

**STRATEGI KEBIJAKAN DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN AGAM
DALAM MENURUNKAN PREVALENSI *STUNTING***

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan Program S-1 Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh :

WAHYU MAULANA VIERY

NIM. 17042266/ 2017

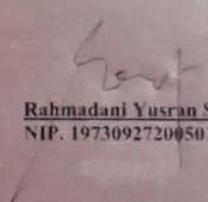
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2021

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Strategi Kebijakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam Dalam Menurunkan Prevalensi Stunting
Nama : Wahyu Maulana Viery
NIM / TM : 17042266/ 2017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 10 November 2021
Disetujui Oleh
Pembimbing


Rahmadani Yusran S.Sos., M.Si
NIP. 197309272005011004

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, tanggal ujian 10 November 2021 Pukul 13.00 WIB s/d 14.30

WIB

**Strategi Kebijakan Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Agam Dalam Menurunkan Prevalensi Stunting**

Nama Wahyu Maulana Viery
TM/NIM 2017/17042266
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 10 November 2021

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Rahmadani Yusran S.Sos., M.Si	1. 
Anggota	Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D	2. 
Anggota	Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA	3. 

Mengesahkan:
Dekan FJS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 196102181984032001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Maulana Viery
NIM/BP : 17042266/ 2017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Kebijakan Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam Dalam Menurunkan Prevalensi Stunting”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 November 2021

Saya yang menyatakan,



Wahyu Maulana Viery

17042266

ABSTRAK

WAHYU MAULANA VIERY 17042266 Strategi Kebijakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam Dalam Menurunkan Prevalensi *Stunting*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Strategi Kebijakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam Dalam Menurunkan Prevalensi *Stunting* dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting*. Angka *stunting* di Indonesia menurut Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan sekitar 7 juta (30,8%) balita menderita *stunting* (Kesehatan, 2018). Pada tahun 2021 Kabupaten Agam ditetapkan menjadi daerah lokus penanganan *Stunting*, sesuai dengan Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No.KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021. Untuk itu Kabupaten Agam telah merancang strategi untuk menangani permasalahan gizi balita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam tahun 2016-2021, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif teknik pengambilan data menggunakan obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Dinas-dinas terkait dan Untuk pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Strategi Kebijakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam Dalam Menurunkan Prevalensi *Stunting* belum optimal dilaksanakan, hal ini ditandai belum terealisasinya program Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan salah satunya peningkatan taraf perekonomian masyarakat di sektor perikanan seperti Mecanangkan Gerakan masyarakat makan ikan, Kurangnya kesadaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam melakukan pergerakan perbaikan gizi masyarakat pada nagari-nagari di Kabupaten Agam, Masih kurangnya sinergi antar OPD, dalam menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Agam, Belum terpenuhinya nutrisi yang dikonsumsi masyarakat di Kabupaten Agam. Belum tepat sasaran strategi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan program untuk mengurangi angka *stunting* di Kabupaten Agam, mengakibatkan pangan di Kabupaten Agam tidak terpenuhi Dan efek dari program kegiatan belum mencapai tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci: Strategi, Kebijakan, Prevalensi, *Stunting*, Dinas Perikanan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahrabbi'l'amin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena rahmat, karunia dan segala nikmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Strategi Kebijakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam Dalam Menurunkan Prevalensi *Stunting***. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) Pada Jurusan Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, serta meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D Selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama memberikan bimbingan, arahan serta saran yang membangun kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibuk Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph. D selaku Penguji Pertama yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zikri Alhadi., S.IP., MA, Selaku Dosen Penguji kedua yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D Selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Dan Ibu Dosen Staff Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
9. Staff karyawan, karyawan keputakaan dan staff administratif Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
10. Bapak/ ibu lainnya yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian data skripsi ini.
11. Teristimewa untuk kedua orang tua bapak John Kennedy dan Ibu Asnidar Djamin, serta Kakak dan Abang yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
12. Khairah Annisa S.AP *best partner* yang selalu kebersamai dari awal perkuliahan hingga saat ini dan membantu dalam menyelesaikan perskripsian, baik dalam keadaan suka maupun duka.

13. Keluarga besar SANAK ajil, iqbal, ervan, iqbal khalif yang selalu memberikan dukungan lahir dan bathin kepada penulis disaat penulis hampir putus asa.

14. Seluruh rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 17 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Termakasih atas kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang telah dibangun bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan yang penulis tidak sadari. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak atau pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 2021

**Wahyu Maulana Viery
17042201**

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat dari penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Konsep Strategi.....	12
2. Konsep Kebijakan Publik.....	16
3. Konsep <i>Stunting</i>.....	19
B. Penelitian Yang Relevan.....	22
C. Kerangka Konseptual.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31

D. Informan Penelitian	31
E. Jenis, Sumber, Teknik, Alat Pengumpulan Data	33
F. Teknik dan pengumpulan data	34
G. Uji Keabsahan Data	35
H. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Temuan Umum	39
B. Temuan khusus	51
C. Pembahasan	83
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Tabel Persentase penduduk Kabupaten Agam pada tahun 2020 menurut jumlah umur dan jenis kelamin.....	47
Tabel 4. 2 Tabel pendapatan perkapita Kabupaten Agam dari tahun 2001 sampai tahun 2009	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten	
Agam	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita dengan ciri-ciri tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya, dampak dari balita yang terkena *stunting* adalah dimana akan lebih mudah untuk terserang penyakit, dan ketika dewasa akan lebih berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. *Stunting* disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita yang terdampak *stunting* akan kesulitan untuk mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal di masa yang akan datang (kesehatan, 2018).

Angka *stunting* di Indonesia menurut Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan sekitar 7 juta atau sekitar 30,8% balita menderita *stunting*. Penurunan angka *stunting* dilihat dari kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, meski telah mengalami penurunan pada tahun 2018, pemerintah tetap harus memperhatikan secara serius terhadap masalah ini agar anak Indonesia dapat tumbuh secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang mampu untuk berkompetisi di tingkat global ((Riskesdas), 2018).

Berbagai kebijakan dan regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi *stunting*. Adapun kebijakan/ regulasi tersebut diantaranya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025,

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019,
3. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015,
4. Undang-Undang (UU) No. 36/2009 tentang Kesehatan,
5. Peraturan Pemerintah (PP) No.33/2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif,
6. Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi,
7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 450/ Menkes/ SK/ IV/ 2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia,
8. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.15/ 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.
9. Permenkes No.3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
10. Permenkes No.23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

Untuk menangani permasalahan *stunting*, salah satunya dengan cara melakukan perbaikan gizi terhadap balita dan juga pemberian makanan tambahan terhadap ibu hamil (PMT), sesuai dengan peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Daerah yang telah melakukan upaya perbaikan gizi diantaranya adalah di daerah Kabupaten Blora. Penerapan kebijakan intervensi gizi sensitif penurunan *stunting* di Kabupaten Blora belum optimal, karena kegiatan intervensi gizi sensitif yang dilakukan oleh lintas sektor atau diluar dari Dinas Kesehatan baru bisa mencakup 10 desa lokus

stunting yang ditentukan dari pusat, sedangkan untuk 39 desa *stunting* yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan belum semuanya bisa tercover sehingga belum memberikan dampak yang signifikan (Nadiya Feryka, 2019). Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga belum maksimal, perlunya dilakukan pendataan secara terpadu, agar upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi tepat sasaran dan efektif sehingga dapat menurunkan angka *stunting* dan perlunya pemantauan terhadap program-program yang dijalankan, sehingga pemerintah dapat memastikan tujuan seperti yang diharapkan (Saputri, 2019). Selain itu penanganan *stunting* di Kabupaten Lombok Utara juga belum maksimal, dikarenakan lemahnya koordinasi dari masing-masing OPD merupakan hal yang paling sering terjadi, hal ini disebabkan oleh lemahnya SDM yang dimiliki oleh setiap OPD, selain itu mobilisasi anggaran yang belum efektif turut menghambat jalannya kegiatan (Hermawati, 2020, p. 53). Fenomena ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia belum berhasil dalam menangani masalah *stunting* dikarenakan jumlah *stunting* yang masih tinggi.

Di Provinsi Sumatera Barat menduduki posisi ke 17 dari 20 provinsi yang memiliki prevalensi melebihi angka prevalensi nasional. Dari hasil status gizi Sumatera Barat tahun 2013 menunjukkan balita *stunting* sebesar 39,2%, dan pada tahun 2018 angka *stunting* berada di angka 30%, dimana terdapat dua daerah yang ditetapkan oleh BAPPENAS RI sebagai daerah rawan *stunting* yaitu Kab Pasaman, dan Kab Pasaman Barat. Untuk tahun 2019 bertambah satu daerah lagi yaitu Kab Solok (Fathur, 2019), dan pada tahun 2021 Kabupaten Agam ditetapkan menjadi daerah lokus penanganan *Stunting* , sesuai dengan Keputusan Menteri

PPN/ Kepala Bappenas No.KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021.

Untuk itu Kabupaten Agam telah merancang strategi untuk menangani permasalahan gizi balita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam tahun 2016-2021, yang mana Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam pengelolaan kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, merupakan salah satu dinas yang menjadi penggerak dalam pencegahan *stunting* dalam ketahanan pangan untuk memperbaiki gizi anak. Karena salah satu cara pencegahan *stunting* berawal dari gizi yang tercukupi dan terpenuhi sesuai dengan standar pemenuhan gizi.

Adapun strategi dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan antara lain:

1. Meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sektor perikanan.

Arah kebijakan:

- a. Memanfaatkan lahan perkarangan dan lahan marjinal sebagai penopang produksi perikanan dan sumber gizi keluarga.
- b. Mekaniskan Gerakan masyarakat makan ikan.
- c. Meningkatkan daya saing produk perikanan.

2. Meningkatkan kedaulatan pangan daerah.

- a) Meningkatkan ketersediaan pangan dalam daerah.
- b) Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan.
- c) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan.

3. Meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Berdasarkan Perpres No.72 Tahun 2021 pada pasal 2 menyebutkan bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*. Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* bertujuan untuk:

- a Menurunkan prevalensi *Stunting*;
- b Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c Menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d Memperbaiki pola asuh;
- e Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan
- f Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Mengingat pentingnya peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat untuk mencapai target prevalensi *stunting* 14% pada tahun 2024. Percepatan penurunan *stunting* ini harus dilaksanakan secara holistic, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara kementerian atau lembaga pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Ketahanan pangan sebagai pilar ke empat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian dan Kesehatan harus bisa saling berkontribusi untuk kegiatan penurunan *stunting*.

Untuk tahun 2021, pemerintah Kabupaten Agam telah menetapkan sebanyak 31 nagari di beberapa kecamatan untuk dijadikan sebagai lokus dalam penanganan masalah *stunting*. Penetapan ke 31 nagari yang menjadi lokus

tersebut di putuskan pada surat keputusan Bupati Agam Provinsi Sumatera Barat No.259 Tahun 2021. Nagari-nagari tersebut berada di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Salah satu nagari yang memiliki angka prevalensi *stunting* yang cukup tinggi dan menjadi nagari lokus dalam penanganan *stunting* adalah Nagari Balai Gurah. Balai Gurah memiliki angka persentase *stunting* sebesar 17,36% baduta (0-23bln) yang terdampak *stunting*, dengan jumlah baduta yang terdampak sebanyak 25 orang, dari jumlah baduta yang ditimbang sebanyak 144 orang. Tingginya angka *stunting* di nagari ini disebabkan oleh 60% dari baduta tidak mendapatkan imunisasi optimal, 4% dari baduta berada di lingkungan perokok, dan juga 84% disebabkan kekurangan energi kronis disaat ibu tengah hamil. Selain itu, kecamatan lain yang memiliki angka prevalensi *stunting* yang cukup tinggi adalah Kecamatan Palembayan dengan persentase sebesar 16,36%, dari jumlah balita yang di timbang sebanyak 605 orang.

Berdasarkan temuan penelitian, seiring dengan pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan mengalami beberapa kendala dan permasalahan, yaitu: Pertama, belum terealisasinya program Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan salah satunya peningkatan taraf perekonomian masyarakat di sektor perikanan seperti Mekanangkan Gerakan masyarakat makan ikan. Belum semua daerah mendapatkan sosialisasi Gerakan masyarakat makan ikan (GEMARIKAN) seperti Nagari Sipinang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. Temuan dilapangan menjelaskan di Nagari Sipinang belum sama sekali ada kerja sama dengan dinas pangan dalam pencegahan *stunting*. dinas yang bekerja sama dengan nagari sipinang baru hanya dinas kesehatan. Padahal Dalam Renstra nya setiap

daerah mendapatkan sosialisasi terkait program GEMARIKAN. Karena dari program gemarikan ini dapat membantu memperbaiki gizi anak dan balita untuk mencegah terjadinya *stunting*. masih banyak masyarakat yang belum paham terkait pengelolaan makan ikan yang baik dan benar.

Kedua, kurangnya kesadaran dinas untuk melakukan pergerakan ke nagari nagari yang ada di Kabupaten Agam dalam upaya memperbaiki gizi masyarakat. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan cenderung menunggu panggilan dari nagari baru akan melaksanakan kegiatan program sosialisasi untuk peningkatan konsumsi makan ikan di masyarakat. Nagari yang tidak melakukan panggilan kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan cenderung tidak mengetahui program GEMARIKAN itu sendiri. Hal ini menyebabkan masyarakat masih tabu akan pentingnya gizi dalam memakan ikan, sehingga tujuan dari renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tidak tercapai.

Ketiga, belum adanya terobosan terbaru dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang berfokus dalam pencegahan penanganan *stunting* di Kabupaten Agam. Sesuai dengan pilar ke 4 percepatan penurunan *stunting* yaitu peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada individu, keluarga dan masyarakat dinas pangan harus mampu memenuhi kebutuhan sumber daya perkarangan untuk asupan gizi masyarakat, serta harus memiliki program khusus terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan anak dibawah 2 tahun. Sedangkan pada tahap ini Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan belum memiliki program tersebut

Keempat, belum terpenuhinya nutrisi dari makanan yang dikonsumsi masyarakat di Kabupaten Agam. Dalam hal ini Kabupaten Agam adalah salah

satu daerah yang menjadi lumbung padi di Sumatera Barat, namun hal ini tidak menjadikan Kabupaten Agam dapat terhindar dari permasalahan *stunting*. hal ini dikarenakan sulitnya untuk merubah pola pikir masyarakat, bahwa kebiasaan masyarakat selama ini cenderung melebihkan makan nasi dari pada lauk pauknya. Seharusnya untuk pemenuhan gizi agar dapat mencegah *stunting* harus mampu mencukupi gizi 4 sehat 5 sempurna, belum lagi cara masyarakat dalam mengolah makanan yang kurang bervariasi membuat kurangnya keinginan masyarakat mengkonsumsi ikan menjadi rendah.

Oleh sebab itu strategi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan belum berhasil mencukupi taraf gizi anak sehingga angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Agam masih cukup tinggi dan mendekati standar WHO sebesar 15%. Pernyataan ini di dukung oleh Direktur JEMARI Sakato, Robi Syafwar MH. Menurut Robi, prevalensi rata-rata *stunting* di Kabupaten Agam hampir 15%, dan dapat dikatakan bahwa 1 dari 6 anak yang lahir di Kabupaten Agam berpotensi *stunting* (Rilis, 2021). Fenomena ini membuktikan bahwa strategi pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan status gizi balita belum berhasil.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Agam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Ditetapkannya Kabupaten Agam menjadi lokus penanganan *stunting* pada tahun 2021.
2. Belum terealisasinya program Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yaitu peningkatan taraf perekonomian masyarakat di sektor perikanan.
3. Kurangnya kesadaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam melakukan pergerakan perbaikan gizi masyarakat pada nagari-nagari di Kabupaten Agam.
4. Masih kurangnya sinergi antar OPD, dalam menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Agam.
5. Belum terpenuhinya nutrisi yang dikonsumsi masyarakat di Kabupaten Agam.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas, maka penulis akan membatasi masalah yang akan penulis teliti yaitu: a) Strategi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan belum berhasil menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Agam, b) Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, dalam upaya meningkatkan derajat gizi masyarakat belum optimal.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam dalam menurunkan prevalensi *stunting*?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Agam?

E. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah diatas, tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis strategi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam dalam menurunkan prevalensi *stunting*.
2. Menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Agam.

F. Manfaat dari penelitian

Dari tujuan masalah diatas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan ilmu administrasi negara khususnya kebijakan publik, pelayanan publik, dan manajemen sumber daya manusia.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh pemerintahan daerah dalam menyelesaikan masalah kebijakan, terutama masalah kebijakan dalam penanganan *stunting*.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan rujukan bagi peneliti lainya, dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Agar pembahasan penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka pada bagian ini akan dibahas beberapa konsep teori yang relevan. Diantaranya adalah Konsep kebijakan publik, konsep strategi, dan konsep *stunting*.

1. Konsep Strategi

a. Definisi Strategi

Strategi berasal dari bahasa latin *Strategia*, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Menurut Jaunch dan Glueck dalam (Suandy, 2008, p. 2) strategi adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah kepada perkembangan suatu strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran dan tujuan. Pendapat dari Jaunch dan Glueck, diperkuat oleh Marrus berpendapat dalam (Priyono, 2020, p. 151) strategi merupakan suatu kegiatan perencanaan sistematis para pembuat kebijakan (pemimpin utama) yang berorientasi pada tujuan organisasi dengan jangkauan waktu yang panjang dimasa mendatang, dimana didalam perencanaan tersebut berisikan langkah-langkah detail dan komprehensif bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam hal ini Marrus memiliki pandangan yang sama dengan Jaunch dan Glueck bahwasanya strategi dibuat untuk mencapai sebuah tujuan. Pendapat Marrus diperkuat oleh pendapat Sukristono, dia menjelaskan strategi dalam (Umar, 2001, p. 31) suatu proses penentuan rencana oleh pemimpin yang berfokus pada tujuan

jangka Panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai.

Berbeda dengan Jaunch and Glueck, Marrus, dan Sukristono. Menurut Salusu dalam (Permana, 1999) strategi merupakan bentuk mencari keuntungan dalam kondisi lingkungan yang efektif sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai sasarannya. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad dalam (Biondi Wattimury, 2019), strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di masa depan. Sejalan dengan pendapat Anwar dalam (Fachrisa, 2019, p. 51) bahwa strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan di jalankan, untuk mencapai tujuan.

Konsep strategi juga dijelaskan oleh Anthony, Perrew, dan Kaemar dalam (Prasetyo, 2017)). Menurut Anthony, Perrew, dan Kaemar strategi dapat dimaknai sebagai formulasi tujuan dan misi organisasi yang termasuk didalamnya adalah rencana aksi untuk mencapai tujuan dengan secara eksplisit dengan mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan diluar organisasi baik secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi. Pengertian ini diperkuat oleh Chandler dalam (Solihin, 2012), Menurut Chandler strategi merupakan penentuan jangka Panjang dari suatu organisasi atau perusahaan dan penerapan tindakan-tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan tujuan-tujuan ini.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi adalah suatu cara yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang akan di capai, dan dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan.

b. Tipe strategi

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sehingga tujuan pada suatu instansi dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Menurut Kooten dalam Salusu (2006:104-105), tipe-tipe strategi meliputi:

1) Corporate Strategy (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Adapun batasan-batasan yang dibutuhkan, yaitu tentang apa yang harus dilakukan dan untuk siapa sehingga nantinya tujuan organisasi dapat tercapai.

2) Program strategy (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Misalnya harus mengetahui Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi) Sehingga tidak terjadi kendala-kendala yang di inginkan.

3) Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi pendukung sumber daya baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya esensial ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

4) Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisatif strategi. Berkaitan dengan penelitian ini, tipe strateginya adalah strategi program. Hal demikian dikarenakan strategi program lebih mengutamakan dampak dari suatu kegiatan itu diperkenalkan dan dilakukan. Strategi program lebih mengedepankan manfaat dari suatu kegiatan yang akan dilakukan.

Faktor keberhasilan dalam mensukseskan strategi Menurut Hatten dan Hatten (1998) dalam Salusu menjelaskan tentang petunjuk untuk mensukseskan strategi :

1. Strategi harus mempunyai konsistensi dengan lingkungan. Dalam hal ini pembuatan strategi hendaklah jangan bertentangan dengan arus perkembangan masyarakat.
2. Organisasi jangan hanya membuat satu strategi, keadaan tersebut tergantung pada ruang lingkup kegiatannya.
3. Strategi yang efektif memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak memisahkannya.

4. Strategi seharusnya lebih memperhatikan pada sesuatu yang merupakan kekuatannya (strenghts) dan tidak hanya pada sesuatu hal yang justru adalah kelemahannya (weakness).
5. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis.
6. Penyusunan suatu strategi juga harus memperhitungkan resiko kecil agar nantinya tidak menjadi sebuah ancaman dalam organisasi.
7. Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
8. Hal-hal yang menjadi tanda-tanda dari berhasilnya suatu strategi terlihat dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para pimpinan teratas, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi atau instansi.

2. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu aturan yang mengatur hidup bersama dan harus ditaati serta berlaku bagi seluruh warganya. Kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu Kebijakan dan publik. Kebijakan merupakan hasil terjemahan dari kata Inggris *policy* yang artinya politik, siasat, kebijaksanaan. Menurut Irfan Islamy, *policy* diterjemahkan dengan kebijakan, artinya kebijaksanaan. Policy atau kebijakan ini tertuang dalam dokumen resmi, peraturan hukum misalnya di dalam UU, PP, Keppres, Peraturan Menteri (Permen), Perda dan lain-lain (Alamsyah, 2016).

Menurut Dye dalam (Kumorotomo, 2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan dari pemerintah untuk melakukan atau tidak

melakukan. Sejalan dengan Dye, Friedrich menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah sebuah usulan tindakan seseorang, sekelompok orang, maupun pemerintah dalam lingkungan yang memberikan hambatan dan peluang. Kebijakan ini diusulkan sebagai upaya mengatasi permasalahan dan juga untuk mewujudkan tujuan dari pemerintah. Pendapat Dye dan Friedrich diperkuat oleh Peters menjelaskan bahwa kebijakan adalah sejumlah kegiatan pemerintah, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, karena tindakan-tindakan tersebut memiliki pengaruh pada kehidupan masyarakat (Kumorotomo, 2017).

Pendapat yang sama dengan Dye, tentang kebijakan dikemukakan oleh Edwards III dan Sharkansky. Menurut Edwards III dan Sharkansky menyebutkan kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan dan policy statemen yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik atau pejabat pemerintah yang segera ditindak lanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah. Pendapat Edwards III dan Sharkansky diperkuat oleh pendapat Anderson. Menurut Anderson kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Suwitri, 2014). Pendapat Anderson juga sama dengan pendapat dari Jonnes (1997) yang memandang bahwa kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan dari kegiatan pemerintah di masa lalu dengan mengubahnya sedikit demi sedikit (Khairi, 2014).

Berbeda dengan pendapat Dye, Edwards III dan Sharkansky, Anderson, dan Jonnes, Eulau dan Previt (1973) dalam (Ayuningtyas, 2018). Eulau dan

Previt (1973) berpendapat bahwa kebijakan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan perilaku secara konsisten dan juga berulang oleh pembuat kebijakan dan melaksanakannya, berhubungan dengan pembuat keputusan atau yang menaatinya. Pendapat Eulau dan Previt (1973) sama dengan Heclo (1972) dalam (Syafiie, 2007, hal. 85). Menurut Heclo (1972) kebijakan sebagai pembuat keputusan (*decision making*) yang dipilih oleh lembaga pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pendapat ini diperkuat oleh Jones dalam (Suryana, 2009, hal. 28) dia memandang kebijakan publik sebagai pembuat keputusan, apabila pemerintah membuat keputusan berarti keputusan itu akan menciptakan tindakan tertentu juga. Karena kebijakan publik ini merupakan keberlanjutan aksi pemerintah di masa lalu yang diperbaiki dari waktu ke waktu.

Pemahaman berbeda mengenai kebijakan publik juga dikemukakan oleh Aminullah menjelaskan bahwa kebijakan adalah upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian yang diinginkan, upaya dan tindakan bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Berkaitan dengan kebijakan Ndaraha menyebutkan bahwa kebijakan berasal dari kata *policy*, yang mempunyai makna sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga bersangkutan dan secara formal bersifat mengikat (Alamsyah, 2016).

Dari penjelasan beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah rencana dan tindakan yang dilakukan secara

langsung atau tidak langsung oleh pemerintah dan juga pihak lain, dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan.

3. Konsep *Stunting*

Secara umum, *stunting* dapat kita artikan atau kita definisikan sebagai balita pendek yang ukuran dan postur tubuh tidak sesuai dengan ukuran balita seumuran denganya. *Stunting* (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita *stunting* di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Kesehatan K. , 2018).

Penjelasan mengenai *stunting* juga diperkuat oleh (WHO, 2017) adalah “*Stunting is the impaired growth and development that children experience from poor nutrition, repeated infection, and inadequate psychosocial stimulation. Children are defined as stunted if their height-for-age is more than two standard deviations below the WHO Child Growth Standards median*” (*Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak balita yang diakibatkan gizi buruk, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak didefinisikan *stunting* jika tinggi badan menurut umur lebih dari 2 Standar Deviasi (SD) dibawah median Standar Pertumbuhan Anak WHO).

Sesuai dengan isi dari Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak, *stunting* adalah status gizi yang diukur berdasarkan indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U), dimana seorang anak apabila nilai z scorenya kurang dari -3SD/ Standar deviasi maka tergolong *very stunded*.

Standar baku ukuran balita sebagaimana digunakan Organisasi Badan Kesehatan Duunia (World Health Organization/WHO) dalam hal ini disepakati menurut Multicentre Growth Reference Study (MGRS) tahun 2006. Kementerian Kesehatan RI juga mendefinisikan *stunting*, diartikan anak balita dengan nilai z-scorenya, bila z-score kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) maka dikategorikan sebagai balita stunted. Anak balita dengan z-score kurang dari minus 3 (-3) SD dikategorikan sebagai balita severely stunted (Priyono, 2020).

Stunting sendiri dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu: a) pengetahuan ibu yang kurang memadai, jika ibu tidak memiliki pengetahuan yang baik akan asupan nutrisi untuknya dan juga untuk bayi, maka untuk mencapai bayi dalam keadaan sehat akan sulit didapatkan, b) infeksi berulang/kronis, terjadinya infeksi sangat erat kaitanya dengan pengetahuan ibu dalam cara menyiapkan makan untuk anak dan sanitasi di tempat tinggal, c) sanitasi yang buruk, dan d) terbatasnya layanan Kesehatan (Alodokter, 2020).

Selain itu factor penyebab dari terjadinya *stunting* juga dijelaskan oleh Kementrian (BAPPENAS, 2019) diantaranya:

- a. Faktor langsung, terdiri dari:

- 1) Akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan, serta
- 2) Kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya air bersih dan sanitasi
- 3) Ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan akses pangan bergizi)
- 4) Lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan).

b. Faktor tidak langsung, terdiri dari:

Kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, pendapatan, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan. Dengan tingginya angka *stunting*, maka akan berdampak besar terhadap tumbuh kembang anak, dan juga terhadap negara. Adapun dampak dari *stunting*/gizi buruk antara lain: a) kognitif lemah dan psikomotorik terhambat, b) kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olah raga, c) lebih mudah terkena penyakit degeneratif (penyakit yang muncul dengan bertambahnya usia), dan d) sumber daya manusia berkualitas rendah (Conversation, 2019). Oleh sebab itu pemerintah serius dalam menangani masalah ini, agar dapat mengurangi resiko dari adanya masalah ini.

Dengan tingginya angka *stunting* dapat dikatakan SDM yang akan datang akan berkualitas rendah dikarenakan dampak yang disebabkan oleh *stunting* ini, sehingga negara akan dirugikan dengan berkurangnya orang-orang atau penerus bangsa yang dapat berkompetitif dengan baik. *Stunting* juga berdampak pada

kerugian ekonomi yang besar, di mana Kementerian Kesehatan Indonesia memperkirakan bahwa prevalensi *stunting* merugikan negara 2-3% dari Produk Domestik Bruto, atau sekitar Rp260 – 390 triliun per tahun (Foundation, 2020).

Selain itu WHO juga menjelaskan beberapa dampak yang diakibatkan dengan terjadinya *stunting* dalam jangka Panjang ataupun pendek yaitu:

- a. Dampak jangka pendek
 - Dapat menimbulkan penyakit dan menyebabkan kematian
 - Terhambatnya perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak.
 - Peningkatan biaya kesehatan.
- b. Dampak jangka panjang
 - Postur tubuh anak akan mengalami gangguan pada saat ia tumbuh dewasa (lebih pendek dari pada anak seumurnya)
 - Dapat meningkatkan resiko obesitas dan penyakit lainnya
 - Bisa menyebabkan kesehatan reproduksi
 - Kapasitas belajar anak tidak akan optimal saat masa sekolahnya
 - Produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal (WHO, World Health Statistics 2017 Monitoring Health For the SDGs, Sustainable Development Goals, 2017)

B. Penelitian Yang Relevan

Pembahasan mengenai strategi kebijakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dari penelitian terdahulu telah dibahas masalah terkait strategi kebijakan

stunting. Maka penelitian yang membahas mengenai strategi kebijakan *stunting* sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Priyono tentang Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Pedesaan (2020) mengungkapkan bahwa, program intervensi peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan *stunting* pada periode 1000 HPK, perlu di utamakan untuk percepatan penurunan *stunting* pedesaan. Hasil dari analisis SWOT menunjukkan untuk strategi yang paling baik dalam upaya penurunan prevalensi *stunting* adalah strategi kombinasi agresif. Priyono (2020) menemukan penurunan *stunting* di tempatnya belum adanya dukungan antar sektor dan multi sektor untuk mencapai sasaran penurunan *stunting*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Priyono (2020) dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah lingkup wilayah penelitian, yang mana Priyono (2020) melakukan penelitian berfokus kepada pedesaan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mencakup kepada upaya daerah Kabupaten. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dimana sama-sama mengkaji tentang strategi penurunan *stunting*.
2. Setelah itu penelitian yang dilakukan oleh Rini Archda Saputri tentang Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan *Stunting* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019) menyatakan, hambatan dalam penanggulangan *stunting* yaitu kurangnya pendataan secara terpadu membuat program yang dikeluarkan oleh dinas Kesehatan kurang tepat sasaran, selain itu kurangnya pemantauan atas program-program yang sudah berjalan untuk dapat memastikan bahwa program yang dijalankan dapat tepat sasaran. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dimana sama-sama melakukan penelitian tentang bagaimana upaya pemerintah didalam menurunkan angka *stunting*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rini (2019) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dimana pada penelitian ini hanya berfokus terhadap satu dinas yaitu Dinas Kesehatan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus kepada bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

3. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Normaisa, Mahsyar dan Sudarmi, tentang Strategi Dinas Kesehatan dalam Menekan Laju Penderita *Stunting* di Kabupaten Enrekang (2020) menjelaskan bahwa, strategi Dinas Kesehatan dalam menekan laju *stunting* strategi Dinas Kesehatan untuk menekan laju penderita *stunting* telah mengalami penurunan pada tahun 2018 dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 dengan harapan kedepannya akan menurun lagi. Adapun hambatan dalam penelitian ini adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada penelitian ini juga hanya berfokus terhadap usaha Dinas Kesehatan didalam melakukan upaya dalam menekan laju *stunting*, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan karena lokasi penelitian yang peneliti pilih merupakan lubang pangan bagi Sumatera Barat.
4. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rr. Vita Nurlatif, Ardiana Priharwanti dengan judul *Stunting: Besaran Masalah & Strategi Pencegahannya Di Kabupaten Pekalongan* menjelaskan bahwa, perencanaan

program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pekalongan sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan petunjuk teknis penurunan *stunting* yaitu Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kabupaten. Hambatan didalam penelitian ini adalah kurangnya keterlibatan aktif semua pihak termasuk elemen terkecil desa. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya keterlibatan aktif semua pihak termasuk elemen terkecil desa yang dimulai dari penyamaan persepsi dan kepentingan. Kelebihan dari penelitian ini adalah dimana didalam perencanaan strategi penanganan *stunting* telah dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan berbagai strategi kebijakan. Kesamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama membahas bagaimana strategi pemerintah didalam menangani permasalahan *stunting*. Perbedaan yang mendasar hanya terletak pada pemilihan lokasi penelitian.

5. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ummi Kalsum, Abas Basuni Jahari yang berjudul Strategi Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang Pada Balita di Provinsi Jambi (2015) menjelaskan bahwa, Didalam strategi pengembangan dan peningkatan upaya Pendidikan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat, hal paling utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan mengarah kepada Kadarzi (Keluarga Sadar Gizi). Hambatan dalam penelitian ini adalah kurangnya kerjasama antar OPD dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting* sehingga strategi penurunan prevalensi *stunting* dapat berjalan dengan baik. Didalam meningkatkan gizi masyarakat,

tidak dapat diberatkan kepada Dinas Kesehatan saja, namun pentingnya Kerjasama antara multi sector agar strategi penurunan prevalensi *stunting* dapat bekerja dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dimana sama-sama membahas bagaimana strategi pemerintah didalam mengatasi masalah gizi buruk/balita pendek (*stunting*). Perbedaan yang mendasar penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pemilihan lokasi penelitian dan juga terletak pada fokus penelitian yang berfokus kepada Dinas Kesehatan.

C. Kerangka Konseptual

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam telah memulai upaya untuk menurunkan prevalensi *stunting* melalui perbaikan gizi masyarakat didalam renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam tahun 2016-2021. Adapun isi renstra yang berkaitan dengan gizi dan ketahanan pangan masyarakat yaitu: Meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sektor perikanan, meningkatkan kedaulatan pangan daerah, dan meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Dalam upaya menanggulangi permasalahan *stunting*, Presiden mengeluarkan peraturan No.72 tahun 2021 pada pasal 2 tentang percepatan penurunan *stunting*, maka ditetapkan strategi percepatan penurunan *stunting*. adapun tujuanya yaitu menurunkan prevalensi *stunting*, meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Dalam upaya percepatan penurunan

stunting ini dapat dicapai melalui pelaksanaan lima pilar percepatan penurunan *stunting*, pada pilar ke 4 yaitu peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga serta masyarakat, untuk itu Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menjadi salah satu sektor yang bertanggung jawab terhadap pilar tersebut.

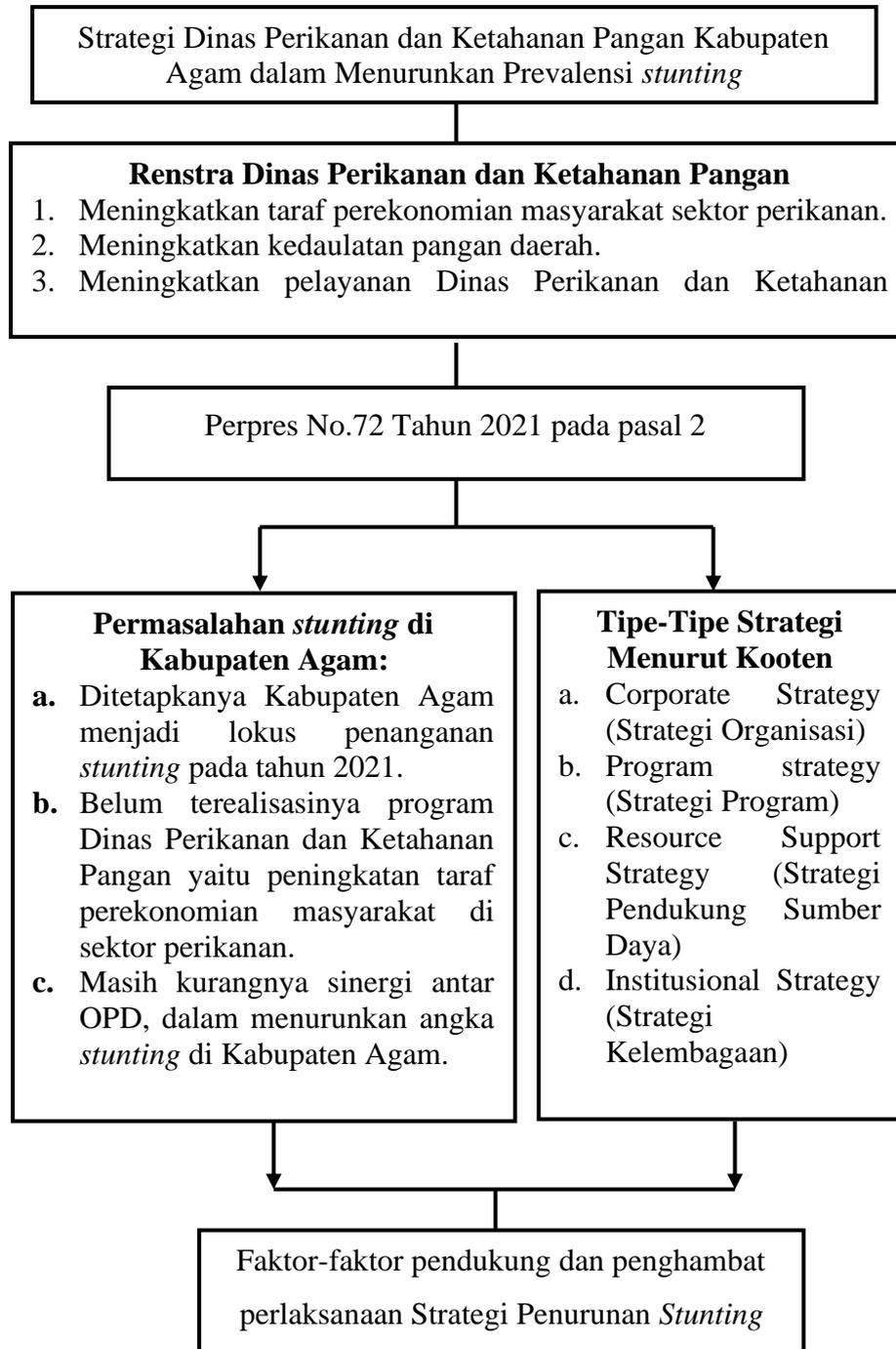
Kabupaten Agam ditetapkan oleh pemerintah menjadi daerah lokus *stunting* untuk tahun 2021. Kabupaten Agam ditetapkan sebagai salah satu Lokasi Prioritas Nasional Penurunan *Stunting* berdasarkan Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No.KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021. Sampai saat ini angka prevalensi *stunting* sebesar 15% hampir mendekati standar WHO.

Namun didalam pelaksanaan strategi yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam dapat dikatakan belum maksimal, dikarenakan masih tingginya prevalensi *stunting* di Kabupaten Agam dan ditetapkannya Kabupaten Agam menjadi lokasi prioritas penanganan *stunting* untuk tahun 2021. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi adalah: 1. Ditetapkannya Kabupaten Agam menjadi lokus penanganan *stunting* pada tahun 2021, 2. belum terealisasinya program Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yaitu peningkatan taraf perekonomian masyarakat di sektor perikanan, 3. kurangnya kesadaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam melakukan pergerakan perbaikan gizi masyarakat pada nagari-nagari di Kabupaten Agam, 4. masih kurangnya sinergi antar OPD dalam menurunkan angka *stunting* di

Kabupaten Agam, dan 5. Belum terpenuhinya nutrisi yang dikonsumsi masyarakat di Kabupaten Agam.

Untuk melihat keberhasilan dari strategi kebijakan publik dapat dilihat dari tipe strategi menurut Kooten dalam (salusu) yaitu: 1) Corporate Strategy (Strategi Organisasi) strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. 2) Program Strategy (Strategi program) strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. 3) Resource support strategi (strategi pendukung sumberdaya) strategi ini merupakan strategi pendukung dari sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumberdaya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. 4) institutional strategy (strategi kelembagaan) fokus dari strategi ini adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Maka berdasarkan tipe strategi di atas dapat mengukur keberhasilan strategi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam dalam menurunkan angka prevalensi *stunting*. adapun bentuk kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perumusan strategi (formulasi kebijakan) penanggulangan *stunting* oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam sudah cukup baik dan terukur dapat dilihat dari kejelasan visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan kegiatan penanggulangan *stunting* yang berfokus pada pemenuhan pangan masyarakat. Jauh sebelum dikeluarkannya perpres no 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* dimana Kabupaten Agam telah melaksanakan kegiatan dalam pemenuhan pangan. Namun memang untuk peraturan bupati Kabupaten Agam belum ada tentang penanganan *stunting* atau pencegahan *stunting*. hal ini disebabkan penetapan Kabupaten Agam sebagai lokus *stunting* baru pada tahun 2021. Sedangkan Pelaksanaan strategi (implementasi kebijakan) yang telah direncanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan kabupaten agam, masih terbatas pada penyelenggaraan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan belum dapat menjangkau semua nagari di Kabupaten Agam. Sosialisasi yang kurang terkait penjelasan program menyebabkan tujuan dari strategi tidak terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan masih banyak masyarakat yang tertinggal dalam penyediaan pangan serta pengolahan pangan. Kurangnya gerakan oleh dinas perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Agam menyebabkan daerah tidak tahu akan

program seperti gemarikan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk ketersediaan pangan. Akibatnya sasaran dan tujuan dari strategi kebijakan tidak sesuai dengan yang diharapkan serta Kabupaten Agam pun menjadi lokus penanganan *stunting* oleh bappenas pada tahun 2021.

2. Faktor pendukung dan penghambat

Faktor pendukung dalam strategi kebijakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam dalam menurunkan prevalensi *stunting* yaitu: sumberdaya manusia yang mendukung, sumberdaya manusia merupakan hal terpenting dalam melaksanakan sebuah kebijakan, dengan sumberdaya manusia yang mendukung maka akan memudahkan pemerintah untuk mencapai tujuan dari kebijakannya. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam memiliki sumberdaya manusia yang mendukung didalam menjalankan programnya, dengan diisi oleh orang-orang yang berkompeten dapat memudahkan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kedua letak geografis yang strategis, dengan letak geografis yang strategis, Kabupaten Agam memiliki iklim yang mendukung sepanjang tahun bagi masyarakat yang beraktifitas di sektor pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Dengan hal tersebut, maka masyarakat akan dimudahkan untuk menanam tumbuh-tumbuh yang dapat dijadikan sumber pangan bagi masyarakat.

Faktor penghambat, dalam melaksanakan strategi kebijakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam dalam menurunkan prevalensi *stunting*, terdapat beberapa faktor penghambat yaitu: pertama,

kurangnya koordinasi antar OPD. Kurangnya koordinasi antar OPD di Kabupaten Agam merupakan salah satu faktor penghambat strategi kebijakan penurunan prevalensi *stunting*. OPD yang terdapat di Kabupaten Agam cenderung melaksanakan kegiatannya sendiri-sendiri sehingga kegiatan penurunan prevalensi *stunting* cenderung lama. Kedua, belum terealisasinya program kesetiap nagari di Kabupaten Agam. program-program yang dijalankan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, belum terealisasikan ke setiap nagari di Kabupaten Agam. Ketiga, keterbukaan data. Data masyarakat terdampak *stunting* masih belum tersampaikan ke setiap nagari, sehingga pemerintah nagari kesulitan membuat kebijakan untuk menangani permasalahan *stunting*.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan, maka saran yang dapat diajukan untuk kebijakan penurunan *stunting* sebagai berikut:

1. Dalam upaya strategi menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Agam, harapan terbesarnya adalah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan agar dapat memperluas jangkauan strateginya. Sebaiknya tidak hanya daerah yang meminta di adakan sosialisasi saja namun lebih kepada daerah yang menjadi prioritas dalam ketahanan pangan bahkan lebih baik seluruh nagari mendapatkan paparan materi atau program dari dinas pangan itu sendiri.
2. Dalam upaya penurunan angka *stunting* sebaiknya Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan untuk bisa mengevaluasi program yang telah dilaksanakan

guna pemantauan kepada masyarakat apakah program tersebut berjalan atau tidak.

3. Dibutuhkannya komunikasi antara dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan wali nagari atau kecamatan, karena pemerintah nagari dan juga Kecamatan tidak dilibatkan dalam program yang dijalankan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
4. Peningkatan kesadaran dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam dalam menjalankan program untuk menurunkan prevalensi stunting, supaya program yang dijalankan dapat terealisasi kepada nagari-nagari yang menjadi lokus dalam penanganan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan jurnal

- (Risikesdas), R. K. (2018). hasil utama riset kesehatan nasional. *Badan Penelitian dan pengembangan kesehatan RI*.
- Abdullah Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12.
- Agam, D. K. (2016-2021). *Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab Agam*. Agam: Dinas Kesehatan.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi* . Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Alodokter. (2020). *Pahami Penyebab Stunting dan Dampaknya pada Kehidupan Anak*. Alodokter.
- Arikunto, S. (2006). *metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ayuningtyas, D. (2018). *Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi (1st ed)*. Depok: Rajawali Pers.
- BAPPENAS. (2019). *Rencana Kerja Pemerintah*. Jakarta: BAPPENAS.
- Biondi Wattimury, d. (2019). STRATEGI PENEMPATAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI DI SEKRETARIAT KOTA AMBON PROVINSI MALUKU. *Biondi Wattimury dkk.: Strategi Penempatan Pegawai Berbasis*, 301-314.
- BKP. (2021). *Peran Kementrian Pertanian dalam Penanganan Stunting*. Jakarta Selatan: Badan Ketahanan Pangan.
- Conversation, T. (2019). Empat dampak *stunting* bagi anak dan negara Indonesia. *Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik*.
- Fachrisa, M. P. (2019). Strategi Komunikasi BKKBN Provinsi Banten Dalam Menanggulangi . *Journal of Scientific Communication*, 51.
- Foundation, T. (2020). *Stunting, Ancaman bagi Masa Depan Anak-anak Indonesia*. Jakarta: TanotoFoundation.
- Hendra, Y. (2020). *Kabupaten Agam Dapat Suntikan Dana Rp 1 Miliar Untuk Stunting*. Agam: Media Indonesia.

- Hermawati, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda*, 53.
- Hidayat, A. (2012). *Penelitian Kualitatif: Penjelasan Lengkap*. Statistikian .
- Ismail, S. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.
- Joko Subagyo, P. (2006). *metode penelitian dalam teori dan praktek*. jakarta: rineka cipta.
- Kesehatan, D. (2016-2021). *Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kab. Agam (2016-2021)*. Kab. Agam: Dinas Kesehatan.
- Kesehatan, D. (2016-2021). *Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Agam*. Kab Agam: Dinas Kesehatan.
- kesehatan, k. (2018). situasi balita pendek (*STUNTING*). 56.
- Khairi, H. (2014). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Tangerang: www.pustaka.ut.ac.id.
- Kumorotomo, W. (2017). *Konsep dan Studi Kebijakan Publik*. yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Meydita Chrysan, G. M. (2020). BASILEK SEBAGAI REPRESENTASI KEKUASAAN DAN KEAKRABAN DALAM TUTUR PENOLAKAN PADA INTERAKSI JUAL-BELI PASAR TRADISIONAL. *Jurnal Skripta, Volume 6 Nomor 2*, 4.
- Moleong, & Lexy, J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, & Lexy, J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roasdakarya.
- Mukhtar. (2013). *Metode praktis penelitian deskriptif kualitatif*. Jakarta: Gp Press Group.
- Nadiya Feryka, D. (2019). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Blora.
- Neuman, & W. Lawrence. (2013). *metode penelitian sosial pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif*. Jakarta Barat: PT indeks permata puri media.

- Nisa, L. S. (2018). kebijakan penanggulangan *stunting* di indonesia. *jurnal kebijakan*, 173-179.
- Normaisa. (2020). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita *Stunting*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>, 910.
- Papilaya, J. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 82.
- Permana, M. S. (1999). *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Prasetyo, D. J. (2017). Analisis Strategi Dalam Menghadapi Toc, Kejahatan Saber, dan Terorisme di Filipina. *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris*, Juni 2017 Volume 3 Nomor 2, 1-16.
- Priyono. (2020). Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Perdesaan. *Jurnal Good Governance Volume 16 No. 2, September 2020*, 151.
- Priyono. (2020). Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Perdesaan. *Jurnal Good Governance Volume 16 No. 2, September 2020*, 150-174.
- Prof. Dr. Sri Suwitri, M. (n.d.). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, 1.7-1.8.
- R.David, F. (2009). *Manajemen Strategis*. Salemba: Salemba Empat Edisi 12, 2009,p.6-7.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12.
- Rilis. (2021). *JEMARI Sakato-Pemkab Agam Gagas Kalaborasi Turunkan Stunting*. Agam: Haluan.com.
- Saputri, R. A. (2019). UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN *STUNTING*DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 152-168.
- Sefira Ryalita Primadany, d. (n.d.). ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 135-143.
- Solihin, I. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, S. E. (2009). implementasi kebijakan tentang pengujian kendaraan bermotor di kabupaten aceh tamiang. *tesis, program studi pembangunan sekolah pascasarjana*, 28.
- Susanti, D. E. (2016). *Metode Penelitian*. Malang: Lilya Susanti.
- Suwitri, S. (2014). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Tangerang: www.pustaka.ut.ac.id.
- Suyanto, M. (2007). *Marketing Strategi Top Brand Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Syafiie, I. K. (2007). *sistem pemerintahan indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Umar, H. (2001). *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Warsito. (2006). *Bunga Rampai Keberhasilan Guru Dalam Pembelajaran*. Jakarta: Depdiknas.
- Widyatama, B. (2015). *Konsep dan Teori Kebijakan Publik*. Kompasiana.
- Yunita, d. (2016). Analisis Kemampuan Kognitif Mahasiswa Pada Konsep Asam-Basa Menggunakan Tes Berdasarkan Taksonomi Bloom Revisi. *Jurnal Pendidikan Vol.1 No.1*.

Web

WHO. (2017). *World Health Statistics 2017 Monitoring Health For the SDGs, Sustainable Development Goals*. France.

Fathur. (2019, April 30). *BKKBN Sumatera Barat*. Retrieved from Pencegahan Stunting Masuk Proyek Prioritas Nasional: <http://sumbar.bkkbn.go.id/pencegahan-stunting-masuk-proyek-prioritas-nasional/>